

## STRATEGI MODERASI DAKWAH ISLAM DALAM KELUARGA, PENDIDIKAN, DAN CIVIL SOCIETY

Ahmad Fahrudin<sup>1</sup>, Wahab Nur Kadri<sup>2</sup>, Yasser Muda Lubis<sup>3</sup>  
Universitas PTIQ Jakarta  
[abah.afahrudin@gmail.com](mailto:abah.afahrudin@gmail.com)

### Abstract

#### Kata kunci:

Moderasi Dakwah,  
Triple Helix  
Moderasi, Media  
Sosial, Civil society,  
Pendidikan  
Keagamaan

*Religious moderation in Islamic da'wah has become increasingly crucial in the digital era, where social media algorithms amplify religious polarisation. This study analyses moderate da'wah strategies at three levels: micro (family), meso (educational institutions), and macro (civil society) using the Integrative Literature Review (ILR) method to develop the Triple Helix Moderation model. The findings reveal that the family plays a more significant role in shaping moderate religious attitudes than previously assumed, with open communication patterns being the key factor in internalising moderation values. While educational institutions and civil society have mainstreamed moderate da'wah, their effectiveness is hindered by social media echo chambers that reinforce exclusivist narratives. This study contributes a new perspective by integrating the roles of family, education, and civil society, shifting the focus from state-centred regulations to community-based approaches. However, this research is limited to a literature review without primary data and focuses solely on Indonesia. Further empirical research with larger samples and cross-national comparisons is necessary to refine moderate da'wah policies and address challenges in the digital era more effectively.*

#### Keywords:

Moderate da'wah,  
Triple Helix, Social  
Media, Civil  
society, Religious  
Education

### Abstrak

Moderasi dalam dakwah Islam semakin krusial di era digital, di mana algoritma media sosial memperkuat polarisasi keagamaan. Penelitian ini menganalisis strategi dakwah moderat pada tiga level: mikro (keluarga), meso (institusi pendidikan), dan makro (civil society) dengan metode *Integrative Literature Review* (ILR) untuk mengembangkan model Triple Helix Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran lebih besar dalam membentuk sikap moderat dibandingkan yang diasumsikan sebelumnya, dengan pola komunikasi terbuka sebagai faktor utama dalam internalisasi nilai moderasi. Meskipun institusi pendidikan dan civil society telah mengarusutamakan dakwah moderat, efektivitasnya masih terhambat oleh "echo chamber" media sosial yang memperkuat narasi eksklusif. Studi ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan peran keluarga, pendidikan, dan civil society, menggeser fokus dari regulasi negara ke pendekatan berbasis komunitas. Namun, penelitian ini terbatas pada tinjauan literatur tanpa data empiris dan hanya berfokus pada Indonesia. Studi lanjutan dengan pendekatan empiris, sampel lebih besar, dan perbandingan lintas negara diperlukan untuk menyusun kebijakan dakwah moderat yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan era digital.

## PENDAHULUAN

Moderasi beragama telah menjadi diskursus penting dalam konteks keberagaman Indonesia yang kompleks. Sebagai negara dengan pluralitas agama, etnis, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan harmoni sosial di tengah potensi konflik berbasis identitas. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi pendekatan strategis untuk membangun pemahaman keagamaan yang inklusif, toleran, dan kontekstual dengan realitas keindonesiaan. Konsep moderasi beragama, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah*, menekankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*ta'adul*), dan toleransi (*tasamuh*) sebagai prinsip fundamental dalam beragama (Nashir dkk., 2019). Pendekatan ini menjadi semakin relevan di era digital yang ditandai dengan akselerasi penyebaran informasi dan meningkatnya polarisasi wacana keagamaan di ruang publik. Kajian tentang moderasi beragama di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap literatur terkini, terdapat beberapa tren penelitian yang dominan. Pertama, studi tentang integrasi nilai-nilai moderasi dalam sistem pendidikan formal, khususnya di lembaga pendidikan Islam (Karnadi dkk., 2023; Putra & Fauzi, 2024; Raikhan & Amin, 2023). Kedua, penelitian tentang peran teknologi digital dalam diseminasi dan penguatan moderasi beragama (Kuswana, 2024; Machendrawaty dkk., 2022; Prastyo & Inayati, 2022). Ketiga, kajian tentang kontribusi organisasi kemasyarakatan Islam dalam membentuk ekosistem moderasi beragama di Indonesia (Charmelita dkk., 2023; Saputra dkk., 2024; Sirin & Sholeh, 2021). Keempat, studi tentang peran keluarga dalam internalisasi nilai-nilai moderasi beragama (Herman dkk., 2024; Supiah & Podungge, 2024; Taufik & Mohsi, 2023).

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada satu domain spesifik (keluarga, pendidikan, atau masyarakat) tanpa mengeksplorasi interkoneksi dan sinergi antar domain tersebut. Sebagaimana diidentifikasi oleh Daheri dkk. (2023), pendekatan terfragmentasi ini menghasilkan implementasi moderasi beragama yang tidak komprehensif dan berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh Mista dkk. (2024) juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pendidikan moderasi beragama, namun belum menawarkan model konseptual yang sistematis untuk mengoperasionalkan integrasi tersebut. Sementara itu, Wardi dkk. (2023) menekankan urgensi kolaborasi multi-stakeholder dalam implementasi moderasi beragama, tetapi belum mengembangkan kerangka teoretis yang menjelaskan dinamika interaksi antar pemangku kepentingan (Fatikh & Hendrik, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan dan menguji model Triple Helix Moderasi yang mengintegrasikan tiga domain utama keluarga, institusi pendidikan, dan civil society dalam membangun ekosistem moderasi beragama yang komprehensif (Mista dkk., 2024; Safi'i dkk., 2023). Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pola interaksi dan sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, dan civil society dalam penguatan moderasi beragama; (2) menganalisis faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat kolaborasi antar domain dalam implementasi moderasi beragama; (3) merumuskan strategi operasional untuk mengoptimalkan peran masing-masing domain dalam membangun ekosistem moderasi beragama yang berkelanjutan; dan (4) mengembangkan indikator keberhasilan implementasi model Triple Helix Moderasi yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi program moderasi beragama (Safi'i dkk., 2023).

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang substansial. Dari perspektif teoretis, model Triple Helix Moderasi yang dikembangkan dalam penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan tentang moderasi beragama dengan menawarkan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan konsep komunikasi keluarga, konsep pendidikan moderasi beragama, dan konsep civil society. Integrasi konseptual ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami dinamika kompleks dalam pembentukan ekosistem moderasi beragama (Aini dkk., 2022). Dari perspektif praktis, penelitian ini berkontribusi pada implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang menetapkan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional. Model Triple Helix Moderasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi pengembang kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan moderasi beragama yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh praktisi pendidikan, aktivis civil society, dan komunitas keagamaan dalam mengembangkan program-program moderasi beragama yang terintegrasi dan kontekstual dengan realitas sosio-kultural Indonesia (Fatima & Fauziah, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Integrative Literature Review (ILR) yang dikombinasikan dengan analisis konten kualitatif untuk mengembangkan model Triple Helix Moderasi. ILR dipilih karena kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai jenis literatur empiris, teoretis, dan konseptual untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang fenomena kompleks seperti moderasi beragama. Proses pengumpulan literatur mengikuti protokol PRISMA yang dimodifikasi, dengan

pencarian dilakukan pada platform seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science, serta jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan meliputi "moderasi beragama", "*wasathiyah*", dan "*religious moderation*". Analisis data dilakukan dengan pendekatan CATAT (*Coding, Annotating, Theming, Analyzing, Theorizing*), di mana setiap artikel diberi kode berdasarkan domain (keluarga, institusi pendidikan, civil society) dan temuan utama. Proses ini melibatkan pengelompokan kode ke dalam tema-tema seperti "mekanisme internalisasi nilai moderasi" dan "strategi kolaborasi". Untuk memastikan kredibilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan peneliti, serta melibatkan panel pakar dari bidang studi Islam, pendidikan, dan civil society untuk memberikan masukan. Hasil analisis digunakan untuk mengembangkan model konseptual Triple Helix Moderasi yang relevan dengan konteks Indonesia (Kriyantono & Sos, 2014).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti kemungkinan terlewatnya publikasi penting yang tidak terindeks, fokus pada literatur terbaru (2019-2024) yang mungkin mengabaikan wawasan dari literatur lama, dan dominasi literatur berbahasa Indonesia yang membatasi perspektif internasional. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan model Triple Helix Moderasi yang kontekstual dengan tantangan moderasi beragama di Indonesia (Bungin, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Karakteristik Moderasi Dakwah pada Level Mikro (Keluarga)*

Keluarga memegang peran sentral dalam membentuk pemahaman keagamaan yang moderat, dengan landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Konsep *ummatan wasathan* (QS. Al-Baqarah: 143) dan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan (QS. At-Tahrim: 6) menjadi dasar teologis utama dalam implementasi moderasi beragama di tingkat keluarga. Kitab-kitab klasik seperti "*Adab al-Mufrad*" karya Imam Bukhari (2008) dan "*Ihya Ulumuddi*" karya Imam Al-Ghazali (2016) secara konsisten menekankan peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Sementara itu, karya kontemporer seperti *Tarbiyatul al-Abna' wal Banat fi Dhau' al-Quran wa as-Sunnah* oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman al-'Ik (2017) mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip ini dengan tantangan modernitas, menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan agama, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai moderasi yang relevan dengan konteks sosial saat ini. Data empiris menunjukkan signifikansi peran keluarga dalam pembentukan sikap moderasi beragama. Studi kuantitatif yang dilakukan oleh Supiah dan Podungge (2024) menemukan bahwa keluarga berkontribusi sebesar 75% dalam pembentukan sikap moderasi beragama pada anak, mengkonfirmasi posisi strategis keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Temuan

ini memperkuat konsensus akademis bahwa fondasi awal pemahaman keagamaan yang terbentuk dalam lingkungan keluarga cenderung bertahan dan memengaruhi perkembangan sikap keagamaan individu pada fase kehidupan selanjutnya. Pola pengasuhan dalam keluarga menjadi variabel signifikan dalam internalisasi nilai-nilai moderasi, dimana penelitian Hamdun (2022) mengklasifikasikan bahwa pola asuh demokratis-otoritatif yang mencakup komunikasi dua arah, keterbukaan dialog, dan konsistensi penerapan nilai terbukti paling efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama pada anak (Chabibi, 2019). Mekanisme transmisi nilai moderasi beragama dalam keluarga dapat dipahami melalui kategorisasi model komunikasi keluarga. Penelitian mengidentifikasi dua pola dominan: pola *conversation-oriented* dan pola *conformity-oriented*. Keluarga dengan orientasi percakapan tinggi (*high conversation orientation*) yang ditandai dengan frekuensi dan kualitas dialog yang intensif tentang berbagai topik termasuk agama, menghasilkan anak-anak dengan pemahaman keagamaan yang lebih moderat dan toleran (Zhan & You, 2024). Orientasi percakapan tinggi memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap nilai-nilai keagamaan, sehingga anak tidak sekadar menerima doktrin agama secara pasif tetapi mampu mengkontekstualisasikan dan menginternalisasikannya dengan pemahaman yang lebih matang dan komprehensif (Fatikh, 2020).

Kontribusi signifikan dalam praktik moderasi dakwah pada level keluarga termanifestasi dalam strategi "unraveling fanaticism, embroidering tolerance" yang dikembangkan oleh keluarga-keluarga di Cigugur, Kuningan sebagaimana diteliti oleh Herman dkk. (2024). Strategi ini merupakan pendekatan sistematis yang melibatkan tiga tahapan esensial: pertama, identifikasi dan dekonstruksi pemahaman keagamaan yang cenderung fanatik; kedua, rekonstruksi pemahaman keagamaan yang inklusif dan kontekstual; dan ketiga, pembiasaan praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Proses dekonstruksi-rekonstruksi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukanlah sikap pasif, melainkan proses aktif yang melibatkan refleksi kritis dan transformasi pemahaman keagamaan. Sementara itu, praktik "spiritual-humanism dialogue" dalam keluarga lintas agama yang diidentifikasi oleh Daheri dkk. (2023) menekankan pentingnya dialog informal dalam konteks keluarga sebagai medium efektif untuk membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjembatani perbedaan keyakinan. Implementasi moderasi beragama pada level keluarga menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi secara sistematis. Berdasarkan penelitian Supiah dan Podungge (2024), terdapat lima faktor utama yang menghambat implementasi moderasi beragama dalam keluarga, yaitu: keberagaman sosial dan agama yang memicu kebingungan; pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung moderasi; tingkat literasi keagamaan yang beragam; tekanan ekonomi; dan

krisis keteladanan. Faktor-faktor ini berinteraksi secara kompleks dan mempengaruhi kapasitas keluarga dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Temuan Herman dkk. (2024) memperdalam pemahaman tentang hambatan ini dengan mengklasifikasikan fanatisme keluarga sebagai penghalang utama dalam pengembangan sikap toleransi. Klasifikasi ini mencakup tiga kategori fanatisme: fanatisme doktrinal (kecenderungan memahami teks keagamaan secara literal dan kaku), fanatisme komunal (loyalitas berlebihan terhadap kelompok keagamaan tertentu), dan fanatisme ideologis (kecenderungan memaksakan pandangan keagamaan tertentu sebagai satu-satunya kebenaran). Sintesis dari berbagai temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas moderasi dakwah pada level keluarga ditentukan oleh interaksi dinamis antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pola asuh, model komunikasi, dan tingkat literasi keagamaan orang tua, sementara faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sosial, akses terhadap sumber-sumber pengetahuan agama yang moderat, dan dukungan institusional. Moderasi beragama pada level keluarga tidak terbentuk secara otomatis, melainkan melalui proses deliberatif yang melibatkan refleksi kritis, dialog berkelanjutan, dan pembiasaan praktik-praktik inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif (pemahaman konseptual tentang moderasi), afektif (internalisasi nilai-nilai moderasi), dan behavioral (manifestasi moderasi dalam praktik keseharian) untuk mengoptimalkan peran keluarga sebagai institusi fundamental dalam pembentukan sikap moderasi beragama pada generasi mendatang (Nurdin, 2021).

### ***Karakteristik Moderasi Dakwah pada Level Meso (Institusi Pendidikan)***

Institusi pendidikan memegang peran krusial dalam membangun moderasi beragama, terutama melalui kurikulum dan praktik pembelajaran yang inklusif. Data Kementerian Agama (2019) menunjukkan perkembangan signifikan dalam penerapan program moderasi beragama di lembaga pendidikan formal Indonesia. Pemetaan karakteristik kurikulum berbasis moderasi mengungkapkan diferensiasi pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar, pendekatan tematik-integratif digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap perbedaan melalui aktivitas pembelajaran konkret. Di jenjang menengah, pendekatan dialogis-reflektif mendominasi, memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis terhadap isu keagamaan kontemporer. Sementara di jenjang pendidikan tinggi, pendekatan analitis-komparatif mendorong mahasiswa mengeksplorasi berbagai perspektif keagamaan secara mendalam, memahami kompleksitas moderasi beragama dalam konteks global (Samho, 2022). Penerapan moderasi beragama dalam kurikulum institusi pendidikan dikategorikan dalam dua

model utama: model terintegrasi (*embedded model*) dan model terpisah (*separated model*). Model terintegrasi memasukkan nilai-nilai moderasi dalam berbagai mata pelajaran/mata kuliah yang relevan, sedangkan model terpisah menjadikan moderasi beragama sebagai mata pelajaran/mata kuliah tersendiri. Temuan empiris dari Bakar dkk. (2024) mengungkapkan bahwa model pembelajaran terintegrasi yang menggabungkan nilai-nilai religius dengan kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi dibandingkan pendekatan doktriner konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dalam pembelajaran memiliki dampak lebih besar terhadap pemahaman peserta didik mengenai pentingnya moderasi dalam kehidupan beragama (Syaifulloh, 2024).

Analisis komprehensif terhadap kebutuhan kapasitas pendidik berdasarkan jenjang pendidikan mengidentifikasi trifokus kompetensi yang harus dikembangkan. Pertama, kompetensi substantif yang mencakup pemahaman konseptual dan epistemologis tentang moderasi beragama, termasuk landasan teologis, filosofis, dan sosiologis dari paradigma moderasi. Kedua, kompetensi pedagogis yang melingkupi kemampuan metodologis dalam mentransmisikan dan menginternalisasikan nilai-nilai moderasi secara efektif melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Ketiga, kompetensi sosio-kultural yang meliputi kapasitas dalam mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip moderasi dengan realitas sosio-kultural peserta didik, sehingga nilai-nilai tersebut tidak bersifat abstrak melainkan relevan dengan pengalaman hidup mereka. Raikhan dan Amin (2023) menekankan urgensi pengembangan kapasitas pendidik melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar dapat mengajarkan nilai-nilai moderasi secara efektif. Pendidik harus mampu menerapkan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam memfasilitasi diskusi tentang moderasi, menciptakan ruang yang aman bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai perspektif tanpa rasa takut atau intimidasi. Sebagai role model, pendidik juga harus mampu mendemonstrasikan sikap dan perilaku moderat dalam interaksi sehari-hari, baik dalam konteks akademik maupun sosial (Putra & Fauzi, 2024).

Penerapan moderasi beragama di lingkungan pendidikan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan dasar, pendekatan eksperiensial-naratif digunakan untuk memperkenalkan konsep keberagaman secara konkret melalui cerita dan pengalaman nyata. Pada tingkat menengah, pendekatan dialogis-reflektif diterapkan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap isu-isu keagamaan yang kompleks. Sementara itu, di perguruan tinggi, pendekatan analitis-kritis menjadi dominan, mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif keagamaan secara mendalam (Karnadi dkk., 2023). Implementasi ini diperkuat oleh kegiatan ekstrakurikuler seperti forum dialog

lintas iman, kunjungan ke tempat ibadah, kegiatan sosial lintas agama, festival budaya, dan pelatihan mediasi konflik berbasis agama, yang terbukti meningkatkan pemahaman dan penerimaan peserta didik terhadap konsep moderasi beragama (Biasutti & Concina, 2021; Kappelmayer dkk., 2023).

Pemanfaatan teknologi digital menjadi aspek integral dalam diseminasi nilai-nilai moderasi beragama di institusi pendidikan. Analisis komprehensif mengidentifikasi empat kategori platform digital yang diutilisasi dalam konteks pendidikan moderasi beragama. Pertama, learning management system (LMS) yang menyediakan infrastruktur digital untuk pembelajaran terstruktur tentang moderasi beragama (Handayani & Suardipa, 2022), memungkinkan peserta didik mengakses materi pembelajaran, berpartisipasi dalam forum diskusi, dan mengerjakan assessment secara daring. Kedua, media sosial (Instagram, YouTube, TikTok) yang dimanfaatkan untuk diseminasi konten moderasi beragama dalam format yang lebih informal dan relatable bagi generasi *digital native* (Pratiwi dkk., 2021). Ketiga, aplikasi mobile khusus yang dikembangkan secara spesifik untuk edukasi moderasi beragama (Fiqar, 2023; K. M. Nisa dkk., 2021). Keempat, podcast yang menyajikan diskusi mendalam tentang isu-isu keagamaan kontemporer dengan format audio yang dapat diakses secara fleksibel (Kusuma dkk., 2024). Pemetaan konten digital moderasi beragama mengungkapkan lima kategori utama: infografis tentang prinsip-prinsip moderasi; video testimoni tokoh agama; podcast diskusi isu-isu keagamaan; game edukasi berbasis moderasi; dan modul *e-learning* interaktif. Studi tentang keterlibatan peserta didik menunjukkan bahwa konten audio-visual pendek (1-3 menit) dengan pendekatan *storytelling* memiliki tingkat engagement tertinggi, mengindikasikan preferensi terhadap format konten yang ringkas namun *impactful* (Puspita & Edvra, 2024).

Keberhasilan implementasi moderasi beragama di institusi pendidikan tidak terlepas dari dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai. Pemetaan kebijakan menunjukkan adanya tiga level regulasi yang berperan dalam menciptakan ekosistem moderasi beragama, yaitu kebijakan nasional (Peraturan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan), kebijakan institusional (peraturan sekolah/kampus), serta kebijakan operasional (panduan implementasi di tingkat kelas). Di samping regulasi, praktik manajemen konflik berbasis moderasi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Empat model manajemen konflik yang umum digunakan adalah model mediasi sebaya, dialog fasilitatif, pendekatan *restorative justice* (Ridho & Chaniago, 2024), dan konseling multikultural (Gani, 2019). Dari keempat model tersebut, kombinasi antara pendekatan *restorative justice* dan dialog fasilitatif terbukti paling efektif dalam mengelola konflik berbasis identitas di lingkungan pendidikan.

Untuk memastikan keberlanjutan program moderasi beragama, evaluasi secara berkala perlu dilakukan guna mengukur efektivitas berbagai pendekatan yang diterapkan. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama: (1) efektivitas kurikulum moderasi beragama dalam menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan inklusivitas; (2) tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam program ekstrakurikuler yang mendukung moderasi beragama; serta (3) dampak kebijakan dan regulasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif. Studi longitudinal yang dilakukan di beberapa institusi pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada sinergi antara kurikulum, peran pendidik, kebijakan, serta partisipasi aktif peserta didik dalam aktivitas berbasis pengalaman langsung

Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek implementasi moderasi beragama di institusi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan kurikulum, kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi digital, serta ekosistem pendukung merupakan strategi yang efektif dalam membangun paradigma keberagamaan yang inklusif dan moderat. Rekomendasi utama bagi pemangku kepentingan meliputi penguatan model pembelajaran terintegrasi, peningkatan kapasitas pendidik melalui model pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan moderasi beragama di institusi pendidikan juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang. Dengan sinergi antara berbagai pihak, moderasi beragama dapat diinternalisasi secara lebih luas dalam sistem pendidikan dan memberikan kontribusi positif bagi terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan toleran.

### ***Karakteristik Moderasi Dakwah pada Level Makro (Civil society)***

Konsep civil society secara global telah mengalami perkembangan melalui enam fase utama yang diidentifikasi oleh para ilmuwan sosial. Pemikiran awal dari Cicero dan Aristoteles dalam konteks Yunani Kuno menggambarkan civil society sebagai komunitas politik yang beradab. Perkembangan selanjutnya melibatkan tokoh seperti Adam Ferguson yang menekankan aspek etis, serta Thomas Paine yang melihatnya sebagai antitesis negara. Pada abad ke-19, Hegel, Marx, dan Gramsci mengelaborasi hubungan kompleks antara civil society, negara, dan ekonomi, sementara Alexis de Tocqueville menekankan fungsinya dalam menyeimbangkan kekuasaan negara. Pada akhir abad ke-20, Cohen dan Arato membedakan civil society dari ranah politik dan ekonomi, menjadikannya lebih relevan dalam konteks demokratisasi (Asrida dkk., 2021). Di Indonesia, evolusi civil society berkembang melalui tiga fase utama: formasi (1990-1998), konsolidasi (1999-2010), dan transformasi (2011-sekarang), masing-masing ditandai

dengan perubahan signifikan dalam dinamika sosial-politik. Fase formasi (1990-1998) menjadi periode penting dalam perkembangan civil society di Indonesia, ditandai dengan munculnya wacana masyarakat madani sebagai respons terhadap hegemoni negara. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang telah hadir sejak awal abad ke-20, memainkan peran sentral dalam mengadvokasi demokratisasi dan toleransi. Pemikiran neo-modernisme Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memberikan landasan filosofis bagi gerakan reformasi (Barton dkk., 2021). Pada fase konsolidasi (1999-2010), terjadi ekspansi signifikan dalam ruang sipil pasca-Reformasi, dengan meningkatnya jumlah organisasi masyarakat sipil dan LSM yang aktif dalam advokasi hak asasi manusia dan demokrasi. Penelitian Setiawan dan Tomsa (2023) mendokumentasikan bahwa antara 1998-2000 saja, jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial hingga mencapai sekitar 70.000 organisasi, termasuk berbagai organisasi lingkungan dan kelompok advokasi hak perempuan. Dalam fase transformasi (2011-sekarang), civil society dihadapkan pada tantangan baru seperti polarisasi agama dan represi negara, namun tetap menunjukkan ketangguhan dalam mempertahankan ruang demokrasi (Setiawan & Tomsa, 2023).

Muhammadiyah dan NU menjadi aktor utama dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia melalui tiga aspek utama: produksi wacana moderasi, implementasi program moderasi, dan advokasi kebijakan publik. Kedua organisasi ini telah mengembangkan berbagai fatwa, taushiyah, dan publikasi yang menekankan pentingnya toleransi dan harmoni sosial. Selain itu, mereka juga mengelola ribuan institusi pendidikan, rumah sakit, dan layanan sosial yang berbasis nilai-nilai inklusif (Charmelita dkk., 2023). Dalam konteks kebijakan publik, Muhammadiyah dan NU berperan dalam mempengaruhi regulasi yang mendukung moderasi beragama, seperti pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 2022 yang melibatkan koalisi luas masyarakat sipil (Setiawan & Tomsa, 2023). Strategi komunikasi memainkan peran instrumental dalam diseminasi nilai-nilai moderasi beragama oleh civil society. Wazis (2022) mengidentifikasi empat fungsi komunikasi yang dapat mengoptimalkan efektivitas transmisi pesan moderasi: (1) fungsi edukatif yang bertujuan meningkatkan literasi dan pemahaman komprehensif tentang konsep moderasi; (2) fungsi persuasif yang diarahkan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat ke arah moderasi; (3) fungsi deliberatif yang memfasilitasi dialog partisipatif dan musyawarah inklusif; (4) serta fungsi mobilisasi yang menggerakkan aksi kolektif untuk implementasi moderasi beragama dalam konteks sosial yang lebih luas. Operasionalisasi fungsi-fungsi komunikasi tersebut terwujud dalam tiga model komunikasi dua arah berbasis deliberatif: forum silaturahmi ulama-umara yang membangun jembatan dialogis antara

otoritas keagamaan dan pemerintah; bahtsul masail tematik yang mengkaji isu-isu kontemporer dari perspektif fikih yang inklusif dan kontekstual; dan dialog publik lintas pemangku kepentingan yang mengintegrasikan diversitas perspektif dalam diskursus moderasi beragama. Strategi *counter-narrative* terhadap ekstremisme juga menjadi komponen integral dalam komunikasi moderasi, mencakup dekonstruksi narasi ekstremis melalui argumentasi teologis, konstruksi narasi alternatif yang menekankan kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi dan HAM, serta amplifikasi suara moderat melalui diversifikasi platform media (Agastia dkk., 2020).

Mediatisasi konflik berbasis agama menjadi salah satu peran kunci civil society dalam menjaga harmoni sosial. Empat model utama yang diterapkan mencakup dialog antariman, program live-in untuk membangun empati lintas komunitas, pemberdayaan ekonomi lintas kelompok keagamaan, serta pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal. Studi kasus FKUB Ambon menunjukkan efektivitas pendekatan "pela gandong" dalam merekonsiliasi konflik komunal melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dengan tradisi lokal (Pikahulan, 2023). Model ini menunjukkan bahwa civil society memiliki kapasitas dalam mereduksi ketegangan sosial dan membangun perdamaian berkelanjutan. Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam diseminasi nilai-nilai moderasi beragama. Data penetrasi internet Indonesia yang mencapai 79,5% dengan 278,7 juta pengguna pada tahun 2024 (APJII, 2024), mengindikasikan signifikansi ruang digital sebagai arena strategis bagi dakwah moderat. Media sosial dan platform digital seperti tvMu dan NU Online menjadi sarana efektif dalam menyebarkan dakwah moderat bagi milenial dan Gen Z dengan konten audiovisual singkat dan atraktif (Kadri, 2022). Sebuah studi menunjukkan bahwa format *storytelling*, infografis, dan video pendek memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan konten tekstual konvensional (Puspita & Edvra, 2024). Oleh karena itu, optimalisasi media digital menjadi kebutuhan dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Meskipun memiliki peran strategis, civil society menghadapi spektrum tantangan internal dan eksternal yang kompleks dalam mempromosikan moderasi beragama. Salah satu tantangan utama adalah infiltrasi kelompok Islamis ke dalam organisasi moderat (Hefner, 2019), yang dilakukan melalui pengambilalihan posisi strategis dalam struktur organisasi. Hal ini berpotensi mengkompromikan integritas dan konsistensi organisasi dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi. Selain itu, tantangan finansial juga menjadi kendala serius, seperti ketergantungan pada donor internasional yang berisiko menimbulkan ketidakberlanjutan program, terbatasnya sumber pendanaan domestik, dan lemahnya sistem pengelolaan keuangan internal. Di luar tantangan internal, hambatan struktural dan kultural seperti fragmentasi otoritas keagamaan, politisasi

identitas keagamaan, kesenjangan digital, resistensi kultural terhadap perubahan, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan juga menghambat implementasi moderasi beragama (Aspinall & Mietzner, 2019). Keberhasilan moderasi beragama bergantung pada pendekatan multidimensional yang mencakup produksi wacana, advokasi kebijakan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan tatanan sosial yang inklusif. Civil society memiliki peran strategis dalam mendiseminasikan nilai-nilai moderasi melalui komunikasi deliberatif dan penguatan ekosistem digital yang adaptif. Tantangan seperti infiltrasi ideologi ekstremis, fragmentasi otoritas keagamaan, dan keterbatasan pendanaan memerlukan sinergi lintas aktor serta penguatan kapasitas institusional. Dengan strategi adaptif dan inovatif, termasuk optimalisasi teknologi digital dan penguatan mediasi konflik berbasis deliberatif, civil society dapat terus menjadi pilar utama dalam menjaga moderasi beragama dan stabilitas sosial di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Model Triple Helix moderasi dakwah merepresentasikan pendekatan ekologis komprehensif dalam memahami interaksi kompleks antara tiga level sistem yang membentuk ekosistem moderasi beragama di Indonesia: mikrosistem (keluarga), mesosistem (institusi pendidikan), dan makrosistem (civil society). Teori ekologi Bronfenbrenner (1981) menyediakan landasan teoretis yang menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana ketiga sistem ini berinteraksi secara dinamis untuk membentuk sikap dan perilaku moderasi beragama individu. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Bakar dkk. (2024) mengkonfirmasi bahwa perubahan pada satu level akan memicu efek domino pada level lainnya, menunjukkan sifat organik dan interdependen dari ekosistem moderasi dakwah. Pendekatan holistik ini menuntut pemahaman komprehensif terhadap mekanisme interkoneksi antar level dan implikasinya terhadap strategi penguatan moderasi beragama di Indonesia. Elaborasi teori ekologi Bronfenbrenner dalam konteks moderasi dakwah menawarkan perspektif multidimensional yang mengakui kompleksitas proses pembentukan sikap keagamaan individu. Mikrosistem keluarga berfungsi sebagai lingkungan terdekat yang membentuk fondasi awal sikap keagamaan melalui sosialisasi primer, pemodelan perilaku, dan pembentukan kelekatan emosional. Mesosistem institusi pendidikan menawarkan kerangka pedagogis yang sistematis untuk mengembangkan pemahaman kognitif dan refleksi kritis terhadap teks-teks keagamaan. Sementara itu, makrosistem civil society menciptakan konteks sosial-budaya yang lebih luas yang memengaruhi interpretasi dan implementasi ajaran agama. Studi kasus Sindang Jati memberikan bukti empiris yang kuat tentang bagaimana sinergisitas antar sistem menghasilkan

moderasi beragama yang berkelanjutan (Daheri dkk., 2023). Perspektif ekologis ini menantang pendekatan reduksionis yang cenderung memisahkan peran masing-masing institusi dan mengabaikan kompleksitas interaksi antar sistem.

Analisis terhadap mekanisme transmisi nilai moderasi mengidentifikasi dua pola utama yang saling melengkapi: *trickle-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas). Dalam pola *trickle-down*, nilai-nilai moderasi yang dikembangkan di level makro (civil society) melalui fatwa, taushiyah, dan publikasi akademik ditransmisikan ke level meso (institusi pendidikan) dalam bentuk kurikulum dan pelatihan pendidik, yang kemudian diteruskan ke level mikro (keluarga) melalui program parenting dan keterlibatan orang tua. Sebaliknya, dalam pola *bottom-up*, praktik-praktik moderasi yang berkembang secara organik di level mikro menjadi model yang kemudian diadopsi dan diskalakan oleh institusi pendidikan dan civil society. Penelitian Supiah dan Podungge (2024) mengungkapkan kontribusi signifikan keluarga (75%) dalam pembentukan sikap moderasi beragama pada anak, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas keluarga sebagai fondasi awal dalam ekosistem moderasi. Kedua pola transmisi ini tidak berjalan secara linier namun membentuk siklus iteratif yang memungkinkan nilai-nilai moderasi terus dievaluasi dan dikontekstualisasikan sesuai dengan dinamika sosial budaya. Identifikasi titik-titik kritis dalam proses transmisi nilai moderasi antarevel mengungkapkan potensi disonansi nilai yang dapat menghambat internalisasi moderasi beragama. Titik-titik transisi, seperti ketika anak mulai memasuki institusi pendidikan formal atau ketika lulusan kembali ke masyarakat, merupakan momen-momen krusial yang memerlukan harmonisasi nilai antarlevel. Herman dkk. (2024) mengidentifikasi bahwa anak-anak dari keluarga dengan pola asuh demokratis-otoritatif akan mengalami kesulitan adaptasi ketika memasuki institusi pendidikan dengan pendekatan otoriter, yang dapat menghambat internalisasi nilai-nilai moderasi. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya kontinuitas nilai antarlevel dan penciptaan "zona transisi" yang memfasilitasi adaptasi harmonis ketika individu berpindah antarlingkungan. Implementasi program seperti "*bridging the gap*" yang menghubungkan nilai-nilai keluarga dengan kurikulum institusi pendidikan, atau program "*re-entry*" yang mempersiapkan lulusan untuk kembali ke masyarakat, dapat memitigasi risiko disonansi nilai pada titik-titik kritis ini.

Analisis komplementaritas fungsional dalam model Triple Helix mengungkapkan bahwa setiap level memiliki kontribusi unik yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh level lainnya. Keluarga (mikro) memiliki keunggulan dalam intensitas dan kontinuitas interaksi yang memungkinkan penanaman nilai secara mendalam melalui keteladanan dan pembiasaan sehari-hari. Institusi pendidikan (meso) unggul dalam pendekatan pedagogis yang sistematis dan terstruktur, serta eksposur terhadap

keberagaman perspektif dan pengalaman melalui interaksi dengan pendidik dan peserta didik yang beragam. Sementara itu, civil society (makro) menyediakan infrastruktur sosial, wacana publik, dan advokasi kebijakan yang membentuk konteks sosial-politik implementasi moderasi beragama. Prinsip subsidiaritas menekankan bahwa intervensi pada level yang lebih tinggi seharusnya bersifat mendukung, bukan menggantikan, fungsi level yang lebih rendah. Dengan demikian, program moderasi yang dikembangkan oleh civil society dan institusi pendidikan seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, peran keluarga sebagai agen sosialisasi primer yang memainkan peran krusial dalam membentuk fondasi awal sikap keagamaan.

Paradigma Triple Helix mendorong transformasi fundamental dalam pendidikan keluarga dari model doktriner-tradisional menuju model dialogis-kontekstual. Daheri dkk. (2023) mengidentifikasi praktik "spiritual-humanism dialogue" dalam keluarga lintas agama sebagai manifestasi konkret dari transformasi ini. Praktik ini memfasilitasi dialog informal tentang nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjembatani perbedaan keyakinan, sehingga memperkuat pemahaman moderasi beragama pada anak. Pergeseran paradigma ini mengubah posisi orang tua dari transmiter pasif nilai-nilai keagamaan menjadi fasilitator aktif yang membantu anak mengeksplorasi dan menemukan makna nilai melalui dialog dan refleksi kritis. Strategi "unraveling fanaticism, embroidering tolerance" yang dikembangkan oleh keluarga-keluarga di Cigugur, Kuningan (Herman dkk., 2024) mendemonstrasikan pendekatan tiga tahap yang melibatkan identifikasi dan dekonstruksi pemahaman keagamaan yang cenderung fanatik, rekonstruksi pemahaman inklusif-kontekstual, dan pembiasaan praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi ini merefleksikan pergeseran epistemologis dalam memahami transmisi nilai keagamaan dari model pedagogis unidireksional menuju model konstruktivis yang mengakui agency anak dalam proses penemuan makna. Implementasi model Triple Helix di level meso menuntut reformulasi komprehensif kurikulum dan pendekatan pedagogis dalam pendidikan moderasi. Penelitian Bakar dkk. (2024) menunjukkan bahwa model pembelajaran terintegrasi yang menggabungkan nilai-nilai religius dengan kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi dibandingkan pendekatan doktriner konvensional. Perubahan pendekatan pedagogis dalam pendidikan moderasi ditandai dengan pergeseran dari model pembelajaran transmisi menuju model pembelajaran transformatif, di mana peserta didik terlibat aktif dalam proses konstruksi makna melalui dialog, refleksi kritis, dan aksi sosial. Kategorisasi pendekatan implementasi berdasarkan jenjang pendidikan mengidentifikasi tiga pola utama yang mencerminkan pergeseran ini: pendekatan eksperiensial-naratif pada jenjang pendidikan dasar, pendekatan dialogis-reflektif pada jenjang pendidikan menengah, dan pendekatan analitis-kritis

pada jenjang pendidikan tinggi. Diferensiasi pendekatan ini mengakui perbedaan tahap perkembangan kognitif dan moral peserta didik, sesuai dengan prinsip kesesuaian pedagogis (*pedagogical appropriateness*) yang menjadi fondasi pendidikan moderasi yang efektif.

Implementasi model Triple Helix di level meso melibatkan pengembangan ekosistem pendidikan komprehensif yang mencakup aspek kurikulum, pedagogi, budaya institusi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Harmonisasi kebijakan pada tiga level kebijakan nasional (Peraturan Menteri), kebijakan institusional (peraturan sekolah/kampus), dan kebijakan operasional (panduan implementasi di tingkat kelas) menjadi prasyarat dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung moderasi. Integrasi nilai-nilai moderasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan budaya institusi melengkapi pembelajaran formal di kelas, menciptakan lingkungan immersif yang memperkuat internalisasi nilai. Analisis terhadap transformasi peran *civil society* dalam ekosistem moderasi mengidentifikasi pergeseran dari peran tradisional sebagai penyedia layanan sosial-keagamaan menuju peran strategis sebagai agen perubahan sosial dan advokasi kebijakan. Pemetaan kontribusi organisasi kemasyarakatan Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU mengungkap tiga area utama: produksi wacana moderasi melalui fatwa dan publikasi, implementasi program moderasi di berbagai bidang, dan advokasi kebijakan publik yang mendukung moderasi beragama. Transformasi ini mencerminkan kesadaran bahwa moderasi beragama bukan sekadar masalah teologis, melainkan juga sosiologis dan politis yang memerlukan pendekatan multidimensional. Praktik inovatif seperti "*collaborative advocacy network*" yang melibatkan koalisi lintas organisasi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan moderasi, atau "*multimedia content factory*" yang memproduksi dan mendistribusikan konten moderasi melalui berbagai platform, mendemonstrasikan bagaimana *civil society* mengadaptasi strategi mereka untuk memaksimalkan dampak dalam ekosistem moderasi. Reposisi strategis ini memperluas jangkauan dan pengaruh *civil society* dalam membentuk diskursus publik dan kebijakan yang mendukung moderasi beragama.

Transformasi lanskap digital menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi implementasi model Triple Helix dalam ekosistem moderasi dakwah. Dengan penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% dan 278,7 juta pengguna pada 2024 (APJII, 2024), ruang digital menjadi arena strategis untuk diseminasi nilai-nilai moderasi. Platform digital seperti tvMu (Muhammadiyah) dan NU Online menawarkan alternatif naratif moderat dalam ekosistem informasi keagamaan digital. Fenomena "*digital da'i*" yang memanfaatkan platform seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok* untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi menggambarkan adaptasi strategi dakwah terhadap preferensi konsumsi media generasi muda. Nadhifah dkk. (2024) mengungkapkan bahwa generasi

Z dan Alpha di Indonesia mengakses informasi keagamaan melalui platform digital, menekankan pentingnya strategi digital dalam menjangkau generasi muda. Adaptasi ini merefleksikan kesadaran bahwa efektivitas dakwah moderat di era digital tidak hanya bergantung pada substansi pesan, tetapi juga pada relevansi format dan platform penyampaian dengan preferensi audiensnya.

Dinamika algoritma platform digital menciptakan tantangan signifikan bagi implementasi model Triple Helix, khususnya dalam aspek transmisi nilai antarevel. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan engagement pengguna cenderung menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble* yang memperkuat pandangan yang sudah dimiliki (Wulandari dkk., 2021), sehingga memperdalam polarisasi dan mempersulit diseminasi nilai-nilai moderasi. Fenomena ini berpotensi menggagalkan upaya transmisi nilai moderasi jika masing-masing level terjebak dalam *echo chamber* yang berbeda. Strategi literasi digital dalam konteks Triple Helix melibatkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan peran keluarga, institusi pendidikan, dan civil society. Pada level mikro, keluarga berperan dalam pendampingan penggunaan media digital dan pemodelan perilaku digital yang sehat; pada level meso, institusi pendidikan berperan dalam pengembangan kurikulum literasi digital yang terintegrasi dengan pendidikan moderasi beragama; dan pada level makro, civil society berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung ekosistem digital yang sehat dan produksi konten digital alternatif yang mempromosikan nilai-nilai moderasi. Implementasi strategi ini memerlukan koordinasi yang kuat antar level untuk memastikan konsistensi pesan dan pendekatan dalam membangun literasi digital yang mendukung moderasi beragama.

Kontestasi politik di Indonesia sering kali melibatkan mobilisasi sentimen keagamaan untuk kepentingan elektoral, yang dapat mengancam upaya membangun moderasi beragama. Analisis wacana terhadap kampanye politik pada Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan narasi keagamaan untuk memobilisasi dukungan, dengan banyak kandidat secara eksplisit menggunakan simbol dan retorika keagamaan dalam kampanye mereka (Nashir dkk., 2019), menciptakan tantangan bagi implementasi model Triple Helix karena dapat menciptakan polarisasi dan mempersulit upaya membangun konsensus tentang nilai-nilai moderasi. Strategi depolitisasi isu moderasi beragama melibatkan upaya untuk memisahkan diskursus moderasi dari kontestasi politik praktis dan memosisikannya sebagai agenda nasional yang melampaui kepentingan politik jangka pendek melalui tiga strategi utama: pengembangan narasi moderasi yang inklusif dan non-partisan, penguatan platform dialog lintas partai tentang moderasi beragama, dan pelibatan tokoh-tokoh agama non-partisan sebagai champion moderasi, yang implementasinya memerlukan kolaborasi

antara keluarga, institusi pendidikan, dan civil society dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya memisahkan isu moderasi beragama dari politik praktis.

Hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kecenderungan radikalisme telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian empiris, dengan studi di Indonesia menunjukkan korelasi positif antara tingkat kemiskinan dan kerentanan terhadap radikalisasi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi aspek ekonomi dalam model Triple Helix, karena upaya membangun moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Program ekonomi inklusif yang dikembangkan oleh ormas keagamaan, seperti koperasi syariah, bank wakaf mikro, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap radikalisasi, dengan evaluasi menunjukkan bahwa peserta yang mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi cenderung menunjukkan sikap keagamaan yang lebih moderat dan toleran. Integrasi aspek ekonomi dalam model Triple Helix melibatkan pendekatan komprehensif dengan peran keluarga dalam penanaman nilai-nilai etika ekonomi Islam yang moderat dan inklusif, peran institusi pendidikan dalam pengembangan kurikulum kewirausahaan yang terintegrasi dengan pendidikan moderasi beragama, dan peran civil society dalam advokasi kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif serta implementasi program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Analisis kebutuhan pengembangan kapasitas pada setiap level mengidentifikasi tiga area prioritas: penguatan kapasitas keluarga dalam pendidikan moderasi dan literasi digital; peningkatan kompetensi pendidik dalam implementasi kurikulum berbasis moderasi; dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan dan diseminasi nilai-nilai moderasi. Model pelatihan terintegrasi untuk aktor-aktor kunci melibatkan pendekatan cascade training, di mana pelatihan dimulai dari level makro (training of trainers untuk tokoh civil society), kemudian diteruskan ke level meso (pelatihan untuk pendidik), dan akhirnya ke level mikro (pelatihan untuk orang tua). Pengembangan modul pelatihan berbasis Triple Helix melibatkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan tiga komponen utama: komponen konseptual (pemahaman tentang konsep moderasi beragama dan model Triple Helix), komponen metodologis (strategi implementasi moderasi pada setiap level), dan komponen praktis (studi kasus dan simulasi implementasi).

Analisis kebutuhan regulasi pendukung implementasi model Triple Helix mengidentifikasi tiga area prioritas: regulasi tentang pendidikan keluarga berbasis moderasi, regulasi tentang kurikulum moderasi beragama di institusi pendidikan, dan regulasi tentang peran civil society dalam implementasi moderasi beragama. Gap

kebijakan dalam kerangka moderasi beragama nasional terutama terletak pada lemahnya integrasi antar level kebijakan dan terbatasnya mekanisme implementasi dan monitoring, dengan harmonisasi kebijakan pada level mikro, meso, dan makro memerlukan pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* yang melibatkan kolaborasi antara berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan non-pemerintah. Implementasi pendekatan ini memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat dan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan moderasi beragama.

Kerangka evaluasi berbasis hasil untuk model Triple Helix melibatkan pendekatan multi-level yang mengukur dampak implementasi pada setiap level. Pada level mikro, evaluasi berfokus pada perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku anggota keluarga terkait moderasi beragama; pada level meso, evaluasi berfokus pada perubahan dalam praktik pembelajaran dan budaya institusi pendidikan; dan pada level makro, evaluasi berfokus pada perubahan dalam diskursus publik dan kebijakan terkait moderasi beragama. Indikator keberhasilan pada setiap level implementasi mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti tingkat pemahaman konsep moderasi dan frekuensi dialog keagamaan dalam keluarga pada level mikro; persentase institusi pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum berbasis moderasi dan jumlah pendidik yang terlatih dalam pendidikan moderasi pada level meso; serta jumlah kebijakan publik yang mendukung moderasi beragama dan frekuensi diskursus moderasi dalam media massa pada level makro. Pengembangan database nasional moderasi beragama menjadi prasyarat penting dalam implementasi monitoring dan evaluasi yang efektif, dengan database ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menyediakan gambaran komprehensif tentang status moderasi beragama di Indonesia dan menjadi basis untuk pengembangan kebijakan dan program berbasis bukti.

Model Triple Helix menawarkan pendekatan holistik dalam membangun ekosistem moderasi beragama yang inklusif dan toleran. Sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, dan *civil society* menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dengan strategi adaptif dan inovatif, termasuk optimalisasi teknologi digital dan penguatan mediasi konflik berbasis deliberatif, *civil society* dapat terus menjadi pilar utama dalam menjaga moderasi beragama dan stabilitas sosial di Indonesia.

## **PENUTUP**

Penelitian ini mengungkap bahwa peran keluarga dalam membentuk sikap moderasi beragama jauh lebih signifikan dibandingkan yang diasumsikan sebelumnya.

Temuan ini mengejutkan karena selama ini pendekatan moderasi beragama lebih banyak difokuskan pada institusi pendidikan dan kebijakan negara. Studi ini menunjukkan bahwa pola komunikasi terbuka dalam keluarga menjadi faktor utama dalam internalisasi nilai moderasi, sementara institusi pendidikan dan civil society memiliki peran sebagai penguat, bukan aktor utama. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun dakwah moderasi telah diurusutamakan melalui pendidikan dan organisasi keagamaan, efektivitasnya masih terkendala oleh algoritma media sosial yang menciptakan "*echo chamber*", memperkuat narasi eksklusif, dan menghambat penyebaran nilai-nilai moderasi.

Dari segi kontribusi keilmuan, penelitian ini tidak sekadar mengkonfirmasi teori moderasi beragama sebelumnya, tetapi juga menyumbangkan perspektif baru dengan mengusulkan Triple Helix Moderasi, yaitu model yang mengintegrasikan peran keluarga, pendidikan, dan civil society dalam membangun moderasi beragama. Model ini menggeser fokus dari pendekatan yang terlalu berpusat pada regulasi negara ke pendekatan yang lebih berbasis komunitas dan interaksi sosial. Selain itu, studi ini juga menawarkan pendekatan multidimensional dalam memahami bagaimana nilai-nilai moderasi beragama ditransmisikan dari level mikro (keluarga), meso (pendidikan), hingga makro (*civil society*).

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diatasi dalam riset lanjutan. Pertama, penelitian ini hanya berbasis tinjauan literatur tanpa eksplorasi data primer, sehingga validitas model yang diusulkan belum teruji secara empiris. Kedua, cakupan penelitian masih terbatas pada konteks Indonesia, sehingga belum dapat menggeneralisasikan model ini dalam konteks global. Ketiga, penelitian ini belum mengakomodasi faktor-faktor lain seperti gender, usia, dan perbedaan geografis, yang mungkin mempengaruhi internalisasi nilai moderasi dalam berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris, sampel yang lebih besar, serta studi perbandingan lintas negara diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas model Triple Helix Moderasi. Dengan hasil yang lebih mendalam dan komprehensif, kebijakan moderasi beragama yang lebih tepat guna dapat dirumuskan untuk menjawab tantangan era digital.

## Daftar Pustaka

Agastia, I. G. B. D., Perwita, Anak Agung Banyu, & Subedi, D. B. (2020). Countering violent extremism through state-society partnerships: A case study of de-radicalisation programmes in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 15(1), 23–43. <https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1722317>

- Aini, N., Aulia, I., & Zulfahmi. (2022). Melawan Intoleransi dan Ekstremisme Media Sosial: Inovasi Kampanye Moderasi Beragama Kanal Youtube Labpsa Tv: Against Social Media Intolerance and Extremism: Religious Moderation Campaign Innovation Labpsa Tv Youtube Channel. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1687>
- al-'Ik, S. K. B. A. (2017). *Prophetic Parenting* (Dwi & Aguk, Penerj.; Cet. 1). Laksana.
- Al-Bukhari. (2008). *Al-Adab AL-Mufrad* (A. Saymsuddin, Ed.). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, I. (2016). *Ihya' 'ulumuddin: Menghidupkan ilmu-ilmu agama* (Purwanto, Penerj.). Marja.
- APJII. (2024). *Survey Penetrasi dan Perilaku Internet 2023*.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Bakar, A., Prastyo, A. T., & Lestantyo, P. (2024). Integration of Religious Moderation Based on Socio-Cultural and Religious Values in the Curriculum of Educational Institutions. *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 9(1), 644. <https://doi.org/10.18860/icied.v9i1.3242>
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), Article 8. <https://doi.org/10.3390/rel12080641>
- Biasutti, M., & Concina, E. (2021). Including migrant students in the primary school: Perspectives of Italian principals. *International Journal of Educational Management*, 35(5), 984–999. <https://doi.org/10.1108/IJEM-01-2021-0028>
- Bronfenbrenner, U. (1981). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv26071r6>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=14586470090727974226&hl=en&oi=scholar>

- Chabibi, M. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3(1), 14–26. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1191>
- Charmelita, E., Lestari, W. T., Akbar, H., Isa, I. M., & Hidayah, A. N. (2023). Analisis Peran Muhammadiyah Dalam Dinamika Perkembangan Islam Moderat. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4939>
- Daheri, M., Rohimin, R., Amin, A., Iqbal, M., & Warsah, I. (2023). Synergisticity of Family, School, and Community Education In Strengthening Religious Moderation. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 10(1), 117–136. <https://doi.org/10.15408/tjems.v10i1.36028>
- Fatikh, M. A. (2020). Tantangan Komunikasi Islam Moderat Di Era New Media. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 5(2), 93–109.
- Fatikh, M. A., & Hendrik, W. (2023). KOMUNIKASI KULTURAL ISLAM DAN BUDAYA. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, 7(2), 48–61. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v7i2.3301>
- Fatima, N., & Fauziah. (2024). The Message Of Da'wah In Films And Criticism Of The Concept Of Reincarnation. *Communicator: Journal of Communication*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59373/comm.v1i2.68>
- Fiqar, M. A. (2023). *Belajar Moderasi Beragama, MAN 1 Pati Garap Game Petualangan*. <https://pendis.kemenag.go.id/madrasah/belajar-moderasi-beragama-man-1-pati-garap-game-petualangan>
- Gani, I. (2019). KONSELING MULTIKULTULAR DALAM PENANGANAN KONFLIK MAHASISWA. *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/al-irsyad>
- Hamdun, D. (2022). The Role of Parenting Styles in Internalizing Islamic Moderation Values in Children: A Phenomenological Study. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.112.137-144>
- Handayani, N. N. L., & Suardipa, I. P. (2022). PENINGKATAN LITERASI DIGITAL DAN MODERASI BERAGAMA MELALUI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS TRIKAYA PARISUDHA PADA SISWA SD GUGUS BANYUNING. *Lampuhyang*, 13(2), 144–155. <https://doi.org/10.47730/jurnalampuhyang.v13i2.314>

- Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On. *Asian Studies Review*.  
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Herman, A. A., Nur, F., Sari, A. N., Ramadhanti, S., Indriyani, D., & Madong, S. A. (2024). Unraveling Fanaticism, Embroidering Tolerance: Family Guidance-Based Religious Moderation. *La Tenriruwa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.30863/jbpi.v3i2.8046>
- Kadri, W. N. (2022). Dakwah Masjid di Era 4.0: Rekonsepsi, Rejuvinasi, dan Revitalisasi. Dalam *Studi Islam di Era 4.0 dalam Perspektif Multidisiplin*. Yayasan Wakaf Darus-Sunnah.
- Kappelmayer, M., Czar, A., Tresca, M., D'Adamo, P., & Lozada, M. (2023). A school intervention promotes compassion, empathy and social relationships in children. *School Psychology International*, 44(5), 515-532.  
<https://doi.org/10.1177/01430343221145668>
- Karnadi, Hasanah, S., Cómputo, E. S. de, & Wilson, E. (2023). Cultural Diversity Education in "Islam and Religious Moderation" Courses: Case Study in Islamic Higher Education. *Edukasia Islamika*, 8(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.28918/jei.v8i2.1713>
- Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa.
- Kriyantono, R., & Sos, S. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gI9ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:uH10H2tT08sJ:scholar.google.com&ots=b0bjvsx94g&sig=Y3swMBj1HgZokg3s6gST-nJIakM>
- Kusuma, A., Anam, M. N., Solihat, A. N., Assyifa, W. N., Alwan, N., Rohman, S., Rendi, R., & Adawiyah, R. (2024). PERANAN PODCAST DALAM PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 77-85.  
<https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.193>

- Kuswana, D. (2024). Digital Counter-Radicalism: The Strategic Role of Religious Organisations in Shaping Moderate Islam in Indonesia's Cyber Realm. *Khazanah Theologia*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/kt.v6i1.33369>
- Machendrawaty, N., Shodiqin, A., & Effendi, D. I. (2022). Da'wah Education Based on Religious Moderation Training Using Digital Technology at Islamic Boarding Schools in East Bandung. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.18124>
- Mista, H., Barkah, I., Mahya, M. J., Anisaningtyas, G., & Nizar, A. (2024). Strategi Pendidikan Nilai Moderasi Beragama Di Lingkungan Keluarga Berbasis Majelis Taklim Kaum Ibu Desa Sukamekar Kab. Bekasi. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 593-604. <https://doi.org/10.51468/jpi.v6i2.748>
- Nadhifah, S. N., Rahmawati, Z., Ramadhan, M. I. H., & Kurniawan, R. (2024). Peran Moderasi Beragama Dalam Pembentukan Akhlak Generasi Alpha Di Era Digital. *AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN*, 6(01), Article 01. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v6i01.3185>
- Nashir, H., Kartono, D. T., Susilo, R. K. D., & Setiaji, B. (2019). Islam in Indonesia: From puritanism to enlightening religion in the case of Muhammadiyah. *Asia Life Sciences: The Asian International Journal of Life Sciences*, 28(1), 51-62.
- Nisa, K. M., Harsan, S. S., Elysia, N. N., & Yumna, Z. A. (2021). Rumah MODEM: Inovasi Aplikasi sebagai Upaya Membangun Moderasi Beragama di MAN 2 Tulungagung. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.75>
- Nisa, Y. F., Hendarmin, L. A., Lubis, D. A., Mubaro, M. Z., Agung, S., Narhetali, E., Rohayati, T., Maulana, D., Saputra, R. E., Utomo, A. P., Ruswandi, B., & Putra, D. K. (2018). *GEN Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Pikahulan, M. S. A. (2023). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Toleransi dan Moderasi Beragama di Kota Ambon. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 9(1). <https://doi.org/10.37196/kenosis.v9i1.655>

- Prastyo, A. T., & Inayati, I. N. (2022). IMPLEMENTASI BUDAYA LITERASI DIGITAL UNTUK MENGUATKAN MODERASI BERAGAMA BAGI SANTRI (STUDI KASUS DI MAHAD UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG). *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.59689/incare.v2i6.361>
- Pratiwi, P. S., Seytawati, M. P., Hidayatullah, A. F., Ismail, I., & Tafsir, T. (2021). Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2959>
- Puspita, B. B., & Edvra, P. A. (2024). Eksplorasi Elemen Digital Storytelling dalam Konten Gaming Youtube Kids. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i1.4543>
- Putra, F. M., & Fauzi, M. (2024). INTEGRASI NILAI-NILAI MODERASI DAN TOLERANSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/fikrah.v8i2.3229>
- Raikhan, & Amin, Moh. N. (2023). Penguatan moderasi beragama: Revitalisasi guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 629–643. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20917>
- Ridho, A., & Chaniago, N. S. (2024). PERAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENGELOLA KONFLIK DI SEKOLAH MTS HUBBUL WATHON. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/im.v7i02.7175>
- Safi'i, I., Fatikh, M. A., Su'adah, F., & Toha, M. (2023). MODERASI BERAGAMA DI TENGAH MASYARAKAT PLURAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA WONOREJO KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO). 6(3).
- Samho, B. (2022). URGENSI “MODERASI BERAGAMA” UNTUK MENCEGAH RADIKALISME DI INDONESIA. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i01.5688>
- Saputra, E., Samad, D., Rais, Z., Amris, F. K., Andrianto, A., & Arwansyah, A. (2024). Peran Filsafat Sebagai Mobilisasi Perkembangan Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i2.5927>

- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2023). Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(3), 350–371. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>
- Sirin, K., & Sholeh, B. (2021). *Ormas Islam dan gerakan moderasi beragama di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. [https://books.google.co.id/books?id=n\\_6l0AEACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=n_6l0AEACAAJ)
- Supiah, & Podungge, M. (2024). Pengaruh Keluarga Dalam Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(2), 206–219. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i2.9898>
- Syaifulloh, R. (2024). The Role Of Interpersonal Communication Of Parents In Building Religious Character In The Technological Era. *Communicator: Journal of Communication*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.59373/comm.v1i2.65>
- Taufik, T., & Mohsi, M. (2023). POLA PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA SEBAGAI PILAR KEHARMONISAN KELUARGA. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 8(2), 222–230. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v8i2.1495>
- Wardi, M., Alias, N. A., Hidayat, T., & Hali, A. U. (2023). Implementation of Education Based on Religious Moderation. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(1), 163–179. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i1.313>
- Wazis, K. (2022). *Komunikasi Massa: Kajian Teoritis dan Empiris* (Cet. I). UIN KHAS Press.
- Wulandari, V., Rullyana, G., & Ardiansah, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423>
- Zhan, W., & You, Z. (2024). Family communication patterns, self-efficacy, and adolescent online prosocial behavior: A moderated mediation model. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03202-2>